



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUKARTI

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 6 April 2021

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Pihak Pertama
KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,



Drs. SUKARTI

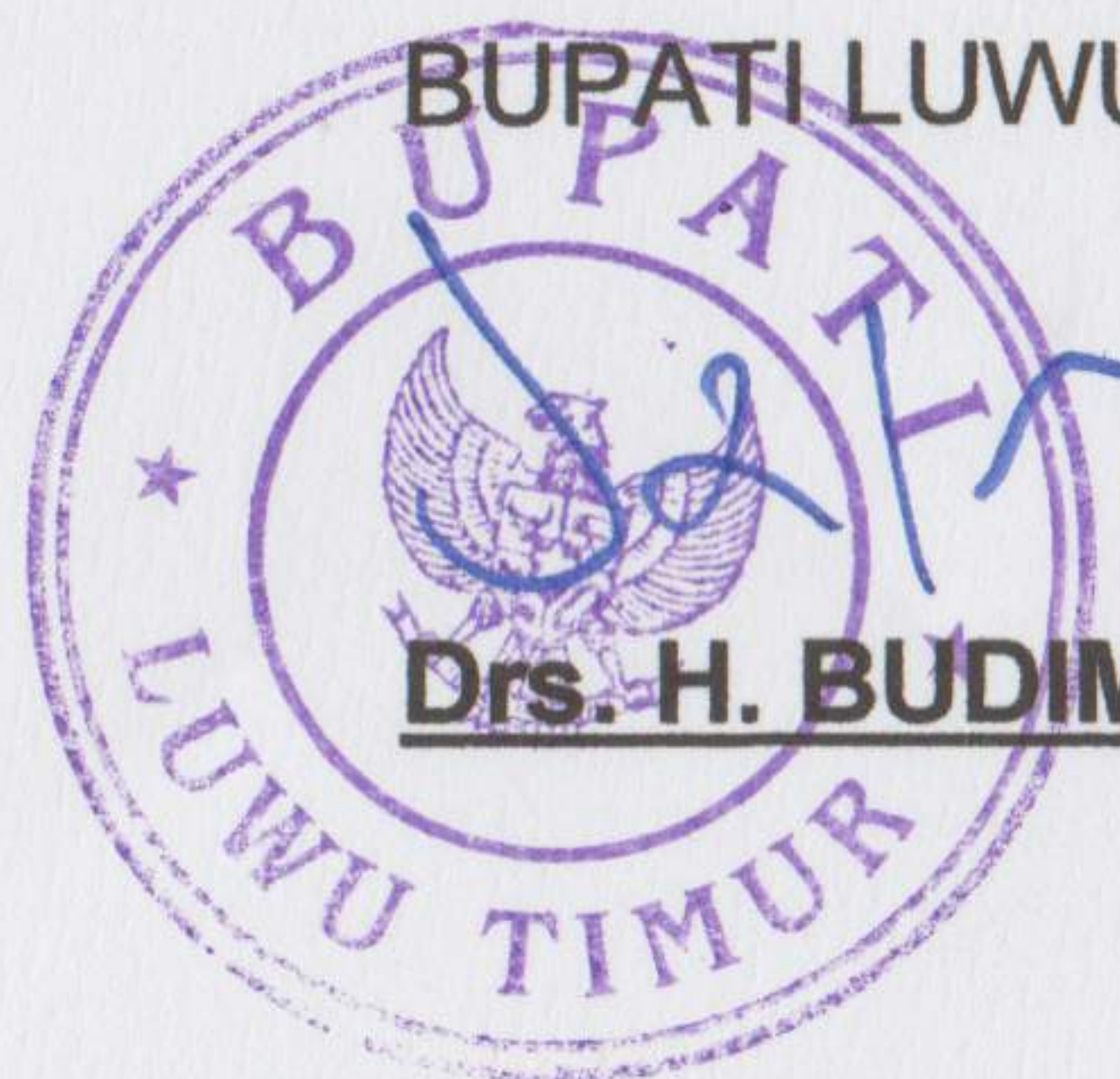
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	70 poin
2	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Indeks Penanganan Permasalahan Sosial	0,29
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	50,93

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 3.221.811.855,-	APBD II
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.454.652.186,-	APBD II
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.120.800.458,-	APBD II
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 574.236.475,-	APBD II
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 212.388.340,-	APBD II
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 65.910,000,-	APBD II
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 192.911.874-	APBD II
8.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 461.616.219,-	APBD II
9.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 49.887.249,-	APBD II
10.	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Rp. 19.086.909,-	APBD II
11.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 111.856.666,-	APBD II

Malili, 6 April 2021

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



Drs. SUKARTI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AMIRUDDIN RUMAE
Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL P3A

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUKARTI
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 6 April 2021

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL P3A,

Drs. SUKARTI

Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

Drs. AMIRUDDIN RUMAE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	Prosentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran (%)	100
	Terlaksanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu (dokumen)	17
	Terlaksanannya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (orang)	10
	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah (%)	100
	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara (%)	100

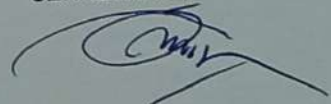
No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.221.811.855	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.524.835	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.230.000	APBD
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.407.156.770	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.132.400	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.210.000	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah	0	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.557.850	APBD

Malili, 6 April 2021

KEPALA DINAS SOSIAL P3A


Drs. SUKARTI

SEKRETARIS,


Drs. AMIRUDDIN RUMAE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CATUR DYAN SINTAWATI, SE,MM

Jabatan : KABID. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUKARTI

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 6 April 2021

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL P3A,



Drs. SUKARTI

Pihak Pertama,

KABID. PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL,

CATUR DYAN SINTAWATI, SE,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan perlindungan jaminan sosial kepada PMKS	Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan social (%)	100
	Tersedianya data Fakir miskin cakupan daerah kabupaten	Jumlah data fakir miskin yang dikelola (dokumen)	1
2	Meningkatnya penanganan bencana alam dan bencana sosial	Prosentase korban bencana yang ditangani (%)	100
	Terlaksananya bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana yang ditangani (jiwa)	150
	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Jumlah tagana yang dibina (orang)	0
3	Meningkatnya pengelolaan Taman makam Pahlawan	Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan social (%)	100
	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (lokasi)	3

	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	574.236.475	APBD
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	574.236.475	APBD
2	Program Penanganan Bencana	212.388.340	APBD
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota	212.388.340	APBD
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0	APBD
3	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	65.910.000	APBD
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65,910,000	APBD

Malili, 6 April 2021

KABID.PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

CATUR DYAN SINTAWATI, SE.MM





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. JULAEHA TALIB, Amd, Keb
Jabatan : KABID. KESETARAAN GENDER,
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUKARTI
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 6 April 2021

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL P3A,

Pihak Pertama,
KABID. KESETARAAN
GENDER, PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK ,



Hj. JULAEHA TALIB, Amd, Keb

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	75.4
		Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	24,6
	Terimplementasinya prasyarat PUG pada SKPD	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39
	Terbinanya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang diberdayakan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (orang)	32
2	Menurunnya rasio korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	0.02
	Terlaksanannya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan (orang)	60
	Terlayaninya pengaduan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilayani (orang)	40
3	Meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga	Prosentase Peningkatan Kualitas Keluarga	0,14
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)	100
4	Tersedianya data gender dan anak	Prosentase Profil Gender dan anak yang tersusun (%)	100
	Tersusunnya profil gender dan anak	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1
5	Terpenuhinya hak-hak atas anak	Prosentase Hak-hak anak yang terpenuhi (%)	100
	Terlaksananya pendampingan pelebagaan hak katas anak pada lembaga pemerintah	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1
	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	192.911.874	APBD
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	84.159.745	APBD
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	108.752.129	APBD
2	Program Perlindungan Perempuan	461.616.219	APBD
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	52.530.000,-	APBD
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	409.086.219,-	APBD
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	49.887.249	APBD
	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.887.249	APBD
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	19.086.909	APBD
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.086.909	APBD
5	Program Pemenuhan Hak Anak	111.856.666	APBD
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	26.651.068	APBD
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	85.205.598	APBD

Malili, 6 April 2021

Pihak Pertama,
KABID. KESETARAAN GENDER,
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Hj. JULAHA TALIB, Amd, Keb

Pihak Kedua,
KEPALA DINASSOSIAL P3A,

Drs. SUKARTI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. RAHMAT. R, S.Sos

Jabatan : KABID. REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUKARTI

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

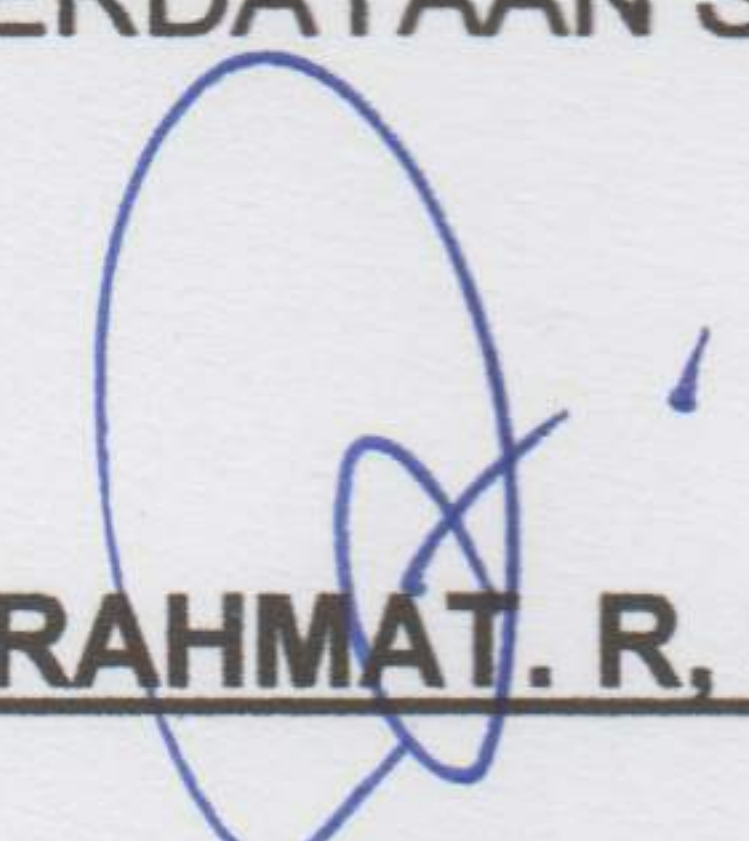
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 6 April 2021

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL P3A,


Drs. SUKARTI

Pihak Pertama,
KABID. REHABILITASI DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL,


MUH. RAHMAT. R, S.Sos

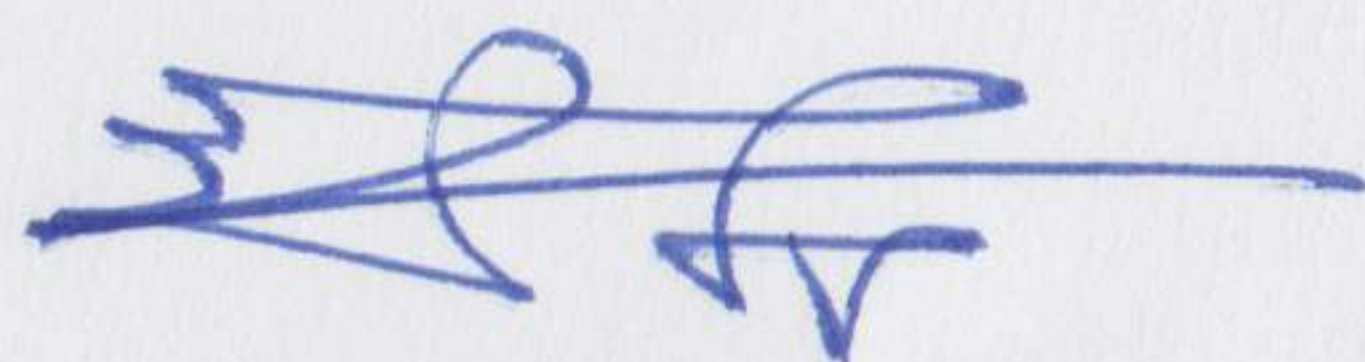
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial pada PMKS	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan Bantuan Sosial (%)	33,24
	Berkembangnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Sumber kesejahteraan soaial daerah yang dikembangkan (kelompok)	27
2	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani (%)	99.13
	Terlaksananya rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang direhabilitasi social (jenis)	2
	Terlaksananya rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDs dan NAFZA di luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya diluar Panti Sosial yang ditangani (jenis)	5

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.454.652.186,- Rp. 3.454.652.186,-	APBD APBD
2	Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAFZA di Luar Panti Sosial	Rp. 1.120.800.458,- Rp. 45.240.000,- Rp. 1.075.560.458,-	APBD APBD APBD

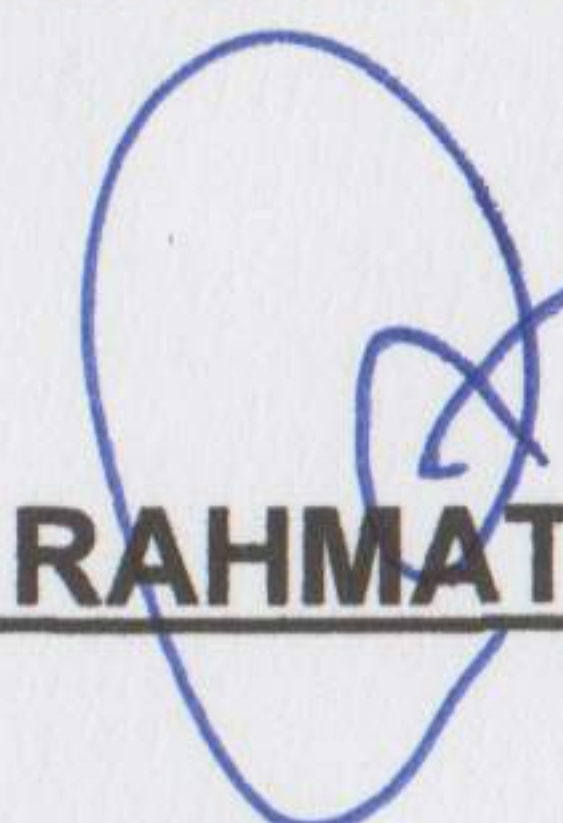
Malili, 6 April 2021

KEPALA DINAS SOSIAL & P3A



Drs. SUKARTI

KABID.REHABILITASI DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL



MUH. RAHMAT R, S.Sos